

Citarum Bermasalah

300 Komunitas Berperan Cegah Kerusakan Lebih Parah

Beragam agenda dan kebijakan pengelolaan Sungai Citarum di Jawa Barat oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota belum menjawab permasalahan utama. Malah sejumlah masalah kini tersisa dan menjadi penanda program itu tidak berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Masalah yang paling krusial adalah belum optimalnya pengendalian pencemaran yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama pemerintah daerah," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat Dadan Ramdan, di Bandung, Jumat (6/6).

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengakui, pembiaran pencemaran dan kerusakan sungai terpanjang di Jawa Barat ini dinilai terlalu lama. "Kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Namun, mulai sekarang semua pihak terkait dan pemerintah harus bersama-sama menyelesaikan persoalan Citarum," ujar Wagub Jabar.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jabar Anang Sudarna menyatakan, pada operasi Mei lalu ditemukan sejumlah industri terindikasi melakukan tindak pidana lingkungan. "Kami segera umumkan dan menyerahkannya kepada penegak hukum," ujar Anang.

Mengutip laporan terakhir audit Badan Pemeriksa Keuangan, Walhi Jawa Barat menemukan sejumlah fakta. Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sumber daya alam wilayah Sungai (WS) Citarum pada umumnya kurang efektif.

Lima tahun ini, ada ketidakefektifan anggaran yang dikelola instansi pemerintah pusat dan daerah senilai Rp 3,93 miliar.

Perbuatan yang memperburuk kondisi lingkungan, antara lain, terdapat empat perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang membuang limbah tanpa memiliki izin pembuangan limbah cair. Tindakan yang sama diduga dilakukan tujuh pelaku usaha (industri) di Kabupaten Bandung yang membuang limbah cair ke WS Citarum melebihi baku mutu lebih dari satu kali. Empat industri lainnya membuang limbah cair tanpa memiliki izin pembuangan limbah cair.

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 16 industri yang membuang limbah cair ke WS Citarum melebihi baku mutu lebih dari satu kali. Sungai sepanjang 269 kilometer ini mengalir melalui wilayah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.

Menurut Dadan, ada dua perencanaan dan koordinasi pengelolaan WS Citarum, yaitu Citarum Roadmap yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan rencana pengelolaan Sungai Citarum yang disusun Kementerian Pekerjaan Umum. Ini mengakibatkan potensi ketidakjelasan pengelolaan Citarum.

Kemandirian masyarakat

Bappenas Maret lalu mengeluarkan rencana kerja yang diterapkan di 10 kilometer di hulu Sungai Citarum yang disebut Aliran Citarum 10K.

Sedikitnya 300 komunitas kemandirian masyarakat memiliki peran besar mencegah kerusakan Sungai Citarum semakin parah. Kerja aktif mereka sering kali jauh lebih efektif ketimbang instansi pemerintah.

"Kemandirian masyarakat ini menjadi modal berharga. Namun, tanpa peran pemerintah yang mengoordinasi kiprah mereka, kerja kreatif itu dikhawatirkan bergerak sporadis tanpa pencapaian hasil efektif," kata Rahim Asik, Direktur Ekoling, lembaga swadaya masyarakat di bidang penyelamatan lingkungan di Sungai Citarum, Jumat.

Rahim mengatakan, kelompok kemandirian masyarakat itu terbagi dalam banyak bidang, mulai dari kelompok pencinta lingkungan, pengolah sampah, hingga kelompok pencinta olahraga air. Pada saat banyak pihak tidak peduli dan terus mencemari Citarum, mereka bergerak tanpa pamrih menyelamatkan sungai sepanjang 279 kilometer ini tanpa pamrih. Dari kawasan hulu di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, hingga hilir di Kabupaten Karawang. (DMU/CHE)